

***THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE FOR
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDESA) IN MERANGIN DISTRICT***

**PENERAPAN TATA KELOLA DAN KINERJA KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) DI KABUPATEN MERANGIN**

Oleh:

Sisti Nurjanah¹⁾, Mukhzarudfa²⁾, Yudi³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: ¹⁾Sistinurjanah26@gmail.com ²⁾Mukhzarudfa@unja.ac.id ³⁾Yudi_Fe@unja.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is the effect of governance principles on financial performance in Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Merangin District. This research is an exploratory study with the research population as all Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Merangin Regency in 2020, totaling 127 BUMDesa. While the samples that met the purposive sampling criteria amounted to 49 BUMDesa. This research is a quantitative study and uses primary data from the distribution of questionnaires. The method used in this research is multiple linear regression analysis with an SPSS 23 software program. The results of the study indicate that simultaneous governance principles with the independent variables are cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable variables affect the independent variables of financial performance. The cooperative principle variable have an influences to financial performance. Participatory principle variables have an influences to financial performance. The principle of emancipation variable has no influences to financial performance. The transparent principle variable have an influences to financial performance. The variable of accountable principles have an influences to financial performance. And the sustainable principle variable has no influences to influences financial performance.

Keywords: Principles Of Governance BUMDesa, Financial Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip tata kelola terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi dengan populasi penelitian adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin Tahun 2020 yang berjumlah 127 BUMDesa. Sedangkan sampel yang memenuhi kriteria purposive sampling berjumlah 49 BUMDesa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer hasil dari penyebaran kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan prinsip-prinsip tata kelola dengan variabel independen prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel berpengaruh terhadap variabel independen kinerja keuangan. Variabel prinsip kooperatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip emansipatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip transparan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip akuntabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan variabel prinsip sustainabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip Tata Kelola BUMDesa, Kinerja Keuangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan sejak tahun 2000 telah berfluktuasi. Program-program yang telah dijalankan pemerintah relatif berhasil dalam mengurangi jumlah orang miskin (Prabowo, 2014)). Penurunan angka jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwasanya pemerintah sangat konsen dalam kondisi ini apalagi setelah adanya reformasi. Pemerintah berupaya maksimal dalam mengatasi salah satu masalah terbesar di negara berkembang ini. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis (Putra, 2015).

Asas Rekognisi berkaitan erat dengan definisi Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa terutama tentang hak asal usul. Inti gagasan Asas Rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal usul Desa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul...” (Putra, 2015). Undang-Undang Desa memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya baik melalui kewenangan asal usul, kewenangan skala lokal desa, dan penugasan. Dengan demikian, desa menjadi unit pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia. “Desa membangun dan Membangun Desa” menjadi slogan dan cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari desa (Widiastuti, Manuhara, & Rahman, 2019).

Kementerian Desa PDTT hadir sebagai institusi yang mengkonsolidasikan paradigma Desa Membangun dan Membangun Desa. Pembangunan Desa (“Desa Membangun”) menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan, sedangkan Pembangunan Perdesaan (“Membangun Desa”) merupakan domain pemerintah (Putra, 2015). Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWA CITA yang menjadi program Jokowi-JK, khususnya NAWA CITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.”

Program NAWA CITA memiliki beberapa program secara tidak langsung pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Budiono, 2015).

Pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat

(1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa. Frasa “dapat mendirikan BUMDesa” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi (Putra, 2015).

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memberikan gambaran mengenai maksud dan tujuan mengenai BUMDesa. Pemerintah Provinsi mencoba bersinergi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten yang mengkoordinir desa-desa untuk dapat merealisasikan organisasi ini. Untuk itu pemerintah mendata secara *sustainable* perkembangan BUMDesa (Dinas D3AP2 Provinsi Jambi, 2019).

Provinsi Jambi ada beberapa kabupaten memiliki jumlah BUMDesa yang terbentuk tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada. Terdapat dua Kabupaten yang diberi tanda merah untuk menandakan bahwa presentase tingkat BUMDesa masih rendah dengan perbandingan jumlah desa. Urutan pertama yakni Kabupaten Kerinci dengan presentase 54,04% dan urutan kedua Kabupaten Merangin dengan presentase 61,95%, serta urutan ketiga Kabupaten Bungo sebanyak 67,38% yang masih dikategorikan sedang diberi warna kuning. Terdapat dua kabupaten yang diberi warna merah dengan tingkat presentasi keaktifan yang masih rendah, yang berada diposisi ini adalah Kerinci sebesar 28,07% dan Merangin sebesar 38,04%. Kabupaten Bungo berada pada posisi selanjutnya dengan tingkat keaktifan sebesar 41,84%.

Sepuluh lebih Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia mati suri. Minimnya kemampuan pengelola serta lemahnya pembinaan dari aparat desa mengakibatkan BUMDesa di tanah air yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan tak sedikit yang gulung tikar (Kumparan.com, 2018). Dalam kiprahnya, BUMDesa memiliki segudang problematika. Pengelolaan BUMDesa bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada proses pengelolaan BUMDesa, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDesa (blog.bumdes.id, 2019).

Provinsi Jambi memiliki 1.399 Desa dengan jumlah BUMDesa 1.113 yang terbentuk. Ada sekitar 324 BUMDesa yang berstatus tidak aktif yang berada di beberapa kabupaten (Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, 2020). Ketidakaktifan BUMDesa di beberapa kabupaten menyiratkan bahwa diprediksi adanya kegagalan badan usaha tersebut dari segala faktor.

Terkait dengan tata kelola pemerintah desa, terlihat bahwa secara umum kapasitas aparat pemerintah desa relatif masih lemah. Soeprapto (2010), kapasitas adalah kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun di dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok pemerintah desa berikut kewenangan telah tertuang secara jelas, akan tetapi dalam praktek, pelaksanaan tugas berikut berbagai macam kewenangan tersebut juga relatif lemah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2017).

Peneliti memilih Kabupaten Merangin untuk dijadikan sampel karena melihat adanya kegagalan BUMDesa yang menjadi sorotan di Provinsi Jambi, sebab informasi ini tertulis dalam surat kabar. Saidin selaku Kepala Desa Air Lago Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin mengungkapkan bahwa tahun 2018 lalu BUMDesa milik desanya tidak mampu meraih keuntungan (Jambi Pos, 2019). Kegagalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan Kades Air Lago Siau terkait.

Faktor-faktor yang terjadi mengarah pada lemahnya tata kelola badan usaha tersebut. Pengelolaan BUMDesa seharusnya dilaksanakan dengan menerapkan berbagai Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel (Purnomo, 2016).

Masalah tata kelola yang kurang baik berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan. Masih banyak masyarakat desa yang belum begitu memahami tata kelola BUMDesa, khususnya tata kelola keuangan BUMDesa. Fenomena ini sesungguhnya menimbulkan kekhawatiran akan optimalisasi penggunaan dana desa yang disalurkan ke BUMDesa. Kekhawatiran ini harus didukung dengan pencarian solusi untuk menghilangkan risiko-risiko yang dapat merugikan BUMDesa (blog.BUMDesa.id, 2019).

Secara teoritis, pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan (Tjager, et al., 2003). Menilai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat hasil dari laporan keuangan yang dibuat tiap periodenya tidak dapat disalahkan namun akan lebih bermakna kalau perusahaan tidak hanya menilai kinerja keuangan dari laporan keuangan saja. Pemaknaan analisis laporan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, kemampuan memperoleh laba, kemampuan mengelola penjualan dan pemasaran serta tingkat pertumbuhan.

Fenomena GAP dan Research GAP yang telah diuraikan diatas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi mengenai "Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan BUMDesa".

Penelitian ini merujuk pada penelitian Harjanti Widiastuti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, Rudy Suryanto (2019) tentang "Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia". Populasi pada BUMDesa Amarta (Sleman), Srimartani (Bantul), dan BUMDesa Dlingo Giritama (Bantul). Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melaksanakan beberapa tahapan. Namun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini tetap menggunakan enam variabel sebelumnya yakni menggunakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Kemudian menambahkan variabel baru sebagai variabel terikat yakni kinerja keuangan. Dengan hal ini peneliti ingin melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan metode analisis regresi berganda hasil penyebaran kuisioner beberapa BUMDesa di Kabupaten Merangin.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
 2. Apakah Prinsip Kooperatif berpengaruh secara parsial Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
 3. Apakah Prinsip Partisipatif berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
 4. Apakah Prinsip Emansipatif berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
 5. Apakah Prinsip Transparan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
 6. Apakah Prinsip Akuntabel berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
1. Apakah Sustainabel berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
2. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Kooperatif secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
3. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Partisipatif secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
4. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Emansipatif secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin

5. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Transparan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
6. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Akuntabel secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
7. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Sustainable secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Tata Kelola (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan telah menjadi subjek banyak studi teoritis dan empiris terutama setelah pelaporan keuangan yang curang skandal seperti Enron, World.com, Adelphia, dan Parmalat. Mengingat pentingnya korporasi praktik tata kelola, banyak analisis telah dilakukan di negara maju mengevaluasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan. Corporate Governance menurut Crowther dan Seifi (2014) bahwa tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai lingkungan kepercayaan, etika, nilai-nilai moral dan kepercayaan diri sebagai upaya sinergis dari semua bagian pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat umum dan lainnya, profesional, penyedia layanan dan sektor korporasi.

2.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola (*Governance*)

Crowther dan Seifi (2014) mengemukakan bahwa tata kelola memiliki delapan (8) prinsip-prinsip yang mendasari setiap sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut: *transparency, rule of law, participation, responsiveness, equity, efficiency* dan *effectiveness, sustainability dan accountability*.

Pengelolaan BUMDesa dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDesa nantinya bahwa pengelolaan BUMDesa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (*sustainability*), dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDesa diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal Desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat (Sofiyani, 2015).

Prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDesa penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah (Purnomo, 2016):

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama

yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat.
6. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa secara berkelanjutan.

2.3. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini dipublikasikan dalam *Journal of Financial Economics* vol. 3, No. 4, 305-360 Oktober 1976 dengan judul "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure". Telah diketahui bahwa para manajer mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori agensi (Brigham & Houston, 2011).

Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan utama berpotensi terjadi diantara pemegang saham dan manajer, serta manajer dan pemilik utang (Brigham & Houston, 2011).

2.4. Teori Asymmetric Information

Asymmetric information atau ketidaksamaan informasi menurut Brigham dan Houston (2011) adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Ketidaksamaan informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada para pemodal (Husnan, 2015).

2.5. Social Enterprise Theory

Definisi *social entrepreneurship* banyak dikembangkan di sejumlah bidang yang berbeda, mulai dari tidak untuk profit, untuk profit, sektor publik, dan kombinasi dari ketiganya. Menurut Bill Drayton (pendiri Ashoka Foundation) selaku penggagas *social entrepreneurship*

terdapat dua hal kunci dalam social entrepreneurship. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha (entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Hulgard (2010) merangkum definisi social entrepreneurship secara lebih komprehensif yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

2.6. Kinerja Keuangan

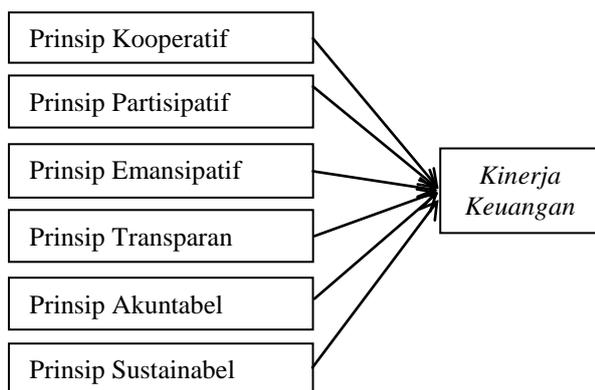
Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Rudianto (2013) pengertian kinerja keuangan adalah “hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.

Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja dengan komponen indikator yang telah disusun sebagai berikut (Sihabudin, 2019):

1. Kemampuan memperoleh laba .
2. Kemampuan mengelola penjualan dan pemasaran.
3. Tingkat pertumbuhan.

2.7. Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah sendiri

Gambar 1. Model Penelitian

2.8. Hipotesis

H1 : Prinsip Koopreatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

H2 : Prinsip Koopreatif berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

H3 : Prinsip Partisipatif berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

H4 : Prinsip Emansipatif berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

H5 : Prinsip Transparan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

H6 : Prinsip Akuntabel berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

H7 : Prinsip Sustainabel berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin Tahun 2020 sebanyak 127. Metode yang digunakan dalam sampel nonprobabilitas adalah pengambilan sampel bertujuan (Purposive sampling). Pengambilan sampel bertujuan digunakan untuk memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan (Cooper & Schindler, 2017). Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. BUMDesa di Kabupaten Merangin Tahun 2020.
2. BUMDesa di Kabupaten Merangin Tahun 2020 berstatus non aktif.
3. Desa yang tidak termasuk kategori status berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IDM) Tahun 2019.

Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, dari 127 BUMDesa di Kabupaten Merangin Tahun 2020 hanya 49 BUMDesa yang memenuhi kriteria sampel.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2017). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel.

Variabel dependen merupakan variabel yang diukur, diprediksi atau dipantau dan diharapkan dipengaruhi oleh manipulasi variabel Independen (Cooper & Schindler, 2017). Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan.

3.3. Metode Analisis

Sesuai dengan tinjauan literatur, hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip kooperatif, prinsip partisipatif, prinsip emansipatif, prinsip transparan, prinsip akuntabel dan

prinsip sustainabel terhadap kinerja keuangan maka digunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

Di mana:

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

X1 = Prinsip Kooperatif

X2 = Prinsip Partisipatif

X3 = Prinsip Emansipatif

X4 = Prinsip Transparan

X5 = Prinsip Akuntabel

X6 = Prinsip Sustainabel

e = Prinsip Error Term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Kualitas Instrumen

4.1.1. Uji Validitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Hasil analisis validitas dari variabel-variabel penelitian ini yang diolah dengan menggunakan SPSS 23 menunjukkan bahwa instrumen kuisisioner dari tujuh variabel memiliki hasil yang valid dikarenakan nilai korelasi person yang lebih besar dibanding dengan nilai tabel r, yaitu sebesar 0,316. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam pengujian-pengujian berikutnya.

4.1.2. Uji Realibilitas

Variabel prinsip kooperatif memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,842, variabel prinsip partisipatif memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,812, variabel prinsip emansipatif memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,852, variabel prinsip transparan memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,975, variabel prinsip akuntabel memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,959, variabel prinsip sustainabel memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,895 dan variabel kinerja keuangan memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,852. Artinya secara keseluruhan nilai cronbach's alpha setiap variabel lebih dari 0,70 sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai realibel dan dapat digunakan dalam pengujian-pengujian berikutnya.

4.2. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini yang diolah dengan menggunakan SPSS 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	44	3,00	5,00	4,1288	,64386
X2	44	2,33	5,00	3,6667	,74362
X3	44	3,00	5,00	3,9205	,62592
X4	44	2,33	5,00	3,7083	,80944
X5	44	3,14	5,00	4,0610	,48184
X6	44	2,40	5,00	3,7909	,70474
Y1	44	3,00	5,00	4,1420	47126

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

1. Pada variabel prinsip kooperatif diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 3,00 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 4,1288 dengan deviasi standar adalah 0,64386 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
2. Variabel prinsip partisipatif diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 2,33 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,6667 dengan deviasi standar adalah 0,74362 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
3. Variabel prinsip emansipatif diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 3,00 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9205 dengan deviasi standar adalah 0,62592 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
4. Variabel prinsip transparan diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 2,33 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7083 dengan deviasi standar adalah 0,80944 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
5. Variabel prinsip akuntabel diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 3,14 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 4,0610 dengan deviasi standar adalah 0,48184 yang artinya nilai mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
6. Variabel prinsip sustainabel diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 2,40 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7909 dengan deviasi standar adalah 0,70474 yang artinya nilai mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

7. Variabel kinerja keuangan diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 3,00 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 4,1420 dengan deviasi standar adalah 0,47126 yang artinya nilai mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data kontinu telah berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Dev	.19221525
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.112
	Negative	-.128
Test Statistic		.849
Asymp. Sig. (2-tailed)		.467

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Tabel di atas terlihat bahwa nilai Asymp.Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,467. Nilai sig ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang di tentukan yaitu sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat disimpulkan data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal, dengan demikian model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan korelasi antar variabel independen, maka adanya masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menimbulkan masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

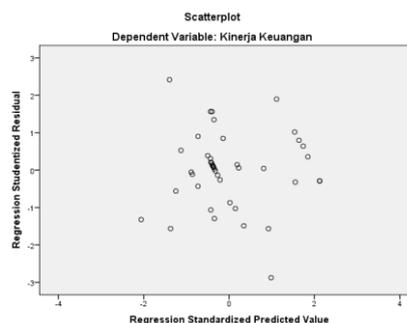
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.598	1,647
	X2	.474	2,110
	X3	.742	1,348
	X4	.556	1,799
	X5	.489	2,043
	X6	.404	2,474

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *VIF* di bawah nilai 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ghozali (2016) menyatakan bahwa jika varian data residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas tampak bahwa pola sebaran data tidak membentuk pola tertentu, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

4.4. Uji Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	,796	,304		2,622	,013
	X1	,229	,063	,312	3,599	,001
	X2	,158	,062	,250	2,568	0,14
	X3	,002	,059	,003	,037	,971
	X4	,131	,052	,225	2,503	0,17
	X5	,254	,094	,260	2,710	,010
	X6	,078	,071	,117	1,106	,276

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel diatas, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan (Y)} = Y = 0,796 + 0,229X1 + 0,158X2 + 0,002X3 + 0,131X4 + 0,254X5 + 0,078X6 + e$$

Penjelasan persamaan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2.195 artinya jika Kepemilikan Konstanta sebesar 0,796 memberikan arti bahwa apabila kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel diasumsikan sebesar 0, maka kinerja keuangan (Y) secara konstan bernilai sebesar 0,796.
2. Koefisien regresi variabel prinsip kooperatif (X1) bernilai positif sebesar 0,229, artinya jika kooperatif sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila nilai kooperatif (X1) meningkat sebesar satu satuan akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,229. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kooperatif maka akan terjadi kenaikan pada kinerja keuangan sebesar 0,229.
3. Koefisien regresi variabel prinsip partisipatif (X2) bernilai positif sebesar 0,158, artinya jika partisipatif sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,158 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila nilai partisipatif (X2) meningkat sebesar satu satuan akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,158. Hal ini menunjukkan bahwa dengan partisipatif maka akan terjadi kenaikan pada kinerja keuangan sebesar 0,158.
4. Koefisien regresi variabel prinsip emansipatif (X3) bernilai positif sebesar 0,002, artinya jika emansipatif sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,002 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila nilai emansipatif (X3) menurun sebesar satu satuan akan mengakibatkan turunnya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa dengan emansipatif maka akan terjadi penurunan pada kinerja keuangan sebesar 0,002.
5. Koefisien regresi variabel prinsip transparan (X4) bernilai positif sebesar 0,131, artinya jika transparan sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,131 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila nilai transparan (X4) meningkat sebesar satu satuan akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa dengan transparan maka akan terjadi kenaikan pada kinerja keuangan sebesar 0,131.
6. Koefisien regresi variabel prinsip akuntabel (X5) bernilai positif sebesar 0,254, artinya jika akuntabel sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,254 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Apabila nilai akuntabel (X5) meningkat sebesar satu satuan akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa dengan akuntabel maka akan terjadi kenaikan pada kinerja keuangan sebesar 0,254.

7. Koefisien regresi variabel prinsip sustainabel (X6) bernilai positif sebesar 0,078, artinya jika sustainabel sebesar 1, maka kinerja keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,078 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila nilai sustainabel (X6) menurun sebesar satu satuan akan mengakibatkan turunnya variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sustainabel maka akan terjadi penurunan pada kinerja keuangan sebesar 0,078.

4.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,796	,304		2,622	,013
	X1	,229	,063	,312	3,599	,001
	X2	,158	,062	,250	2,568	0,14
	X3	,002	,059	,003	,037	,971
	X4	,131	,052	,225	2,503	0,17
	X5	,254	,094	,260	2,710	,010
	X6	,078	,071	,117	1,106	,276

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip kooperatif terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.11 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai t-hitung sebesar 3,599 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau ($0,001 < 0,05$), maka H2 diterima yang berarti bahwa prinsip kooperatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip partisipatif terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.9 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,014 dengan nilai t-hitung sebesar 2,568 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau ($0,014 < 0,05$), maka H3 diterima yang berarti bahwa prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip emansipatif terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.9 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,971 dengan nilai t-hitung sebesar 0,037 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 atau ($0,971 > 0,05$), maka H4 ditolak yang berarti bahwa prinsip

emansipatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip transparan terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.9 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,017 dengan nilai t-hitung sebesar 2,503 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau ($0,017 < 0,05$), maka H5 diterima yang berarti bahwa prinsip transparan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip akuntabel terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.9 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,010 dengan nilai t-hitung sebesar 2,710 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau ($0,010 < 0,05$), maka H6 diterima yang berarti bahwa prinsip akuntabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel prinsip sustainabel terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.9 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,276 dengan nilai t-hitung sebesar 1,106 (positif) dan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 atau ($0,276 > 0,05$), maka H7 ditolak yang berarti bahwa prinsip sustainabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4.6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel pertumbuhan laba. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel pertumbuhan laba. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.834	.807	.20722	1.965
a. Predictors: (Constant), X6,X5,X4, X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0,834. Ini berarti bahwa kemampuan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel terhadap kinerja keuangan sebesar 83,4%. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel terhadap kinerja keuangan dipengaruhi sebesar 83,4% sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi yang baik.

4.7. Pembahasan

4.7.1. Pengaruh Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh Fhitung sebesar 30,901 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi Kooperatif (X1), Partisipatif (X2), Emansipatif (X3), Transparan (X4), Akuntabel (X5), dan Sustainabel (X6), secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel Kinerja Keuangan (Y) secara signifikan maka hipotesis kesatu (H1) dengan Ha diterima. Artinya prinsip-prinsip tata kelola secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi simultan (R Square) sebesar 0,834. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 83,4%. Hal ini berarti 83,4% kinerja keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Kooperatif (X1), Partisipatif (X2), Emansipatif (X3), Transparan (X4), Akuntabel (X5), dan Sustainabel (X6) sedangkan sisanya ($100\% - 83,4\% = 16,6\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Priyanka Aggarwal (2013) yang menyatakan bahwa Peringkat tata kelola memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dibangun bahwa tata kelola tidak hanya dijalankan pada perusahaan ataupun sektor besar, pentingnya penerapan tata kelola sendiri juga dapat dilaksanakan pada unit terkecil seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rerata tingkat keterterapan variabel kooperatif sebesar 4,13 artinya pada posisi baik, variabel partisipatif sebesar 3,67 artinya pada posisi cukup baik, variabel emansipatif sebesar 2,92 artinya pada posisi kurang baik, variabel transparan sebesar 3,72 artinya pada posisi cukup baik, variabel akuntabel sebesar 4,06 artinya pada posisi baik, dan variabel sustainabel sebesar 2,79 artinya pada posisi kurang baik. Secara akumulasi dan di rata-ratakan keterterapan tata kelola sebesar 3,89 artinya pada posisi cukup baik yang mendekati posisi baik. Rerata kinerja keuangan yang dihasilkan sebesar 4,14 artinya pada posisi baik. Dengan kata lain semakin baik penerapan tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka semakin baik pula kinerja keuangan.

Sejalan dengan teori agensi bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Brigham dan Houston, 2011). Pada hal ini

Kepala Desa memberikan kewenangan kepada perangkat BUMDesa untuk merealisasikan Permendes No 4 tahun 2015 sebagai upaya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagian besar modal BUMDesa berasal dari Dana Desa yang diperuntukkan sebagai modal awal menjalankan kegiatan. Dalam mewujudkan badan usaha untuk mencapai suatu tujuan atau target yang diinginkan tentu tidak mudah sehingga diperlukan kekuatan utama. Penerapan tata kelola merupakan faktor utama dalam keberhasilan BUMDesa pada kinerja keuangan. Oleh karenanya prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa ini mampu membawa pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja dan membuat BUMDesa tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi menularkan manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar.

4.7.2. Pengaruh Prinsip Kooperatif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) kooperatif (X_1) = 3,599, signifikansi = 0,001 dan standar coefficients = 0,312 (31,2%). Karena nilai thitung > dari ttabel (3,599 > 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh $0,001 < 0,05$, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis kedua (H_2) dengan H_a diterima. Artinya prinsip kooperatif (X_1) berpengaruh sebesar 31,2% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip kooperatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik menerapkan prinsip kooperatif maka semakin baik pula dalam meningkatkan kinerja keuangan. Rerata tingkat keterterapan variabel kooperatif sebesar 4,13 artinya pada posisi baik. Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa telah melaksanakan kerja sama yang baik ketika penerapan prinsip kooperatif ini dijalankan. Pelaksanaan kerja sama yang baik pada semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Dimana seiring berjalannya waktu perolehan laba meningkat dan pertumbuhan usaha mengalami perkembangan.

Pada poin K1 (mekanisme kerja sama pihak BUMDesa dan pihak lain dalam pengembangan usaha) di kuesioner menghasilkan rerata sebesar 4,11 artinya pada posisi baik. Pelaksanaan mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan usaha mengakibatkan laba semakin bertambah dan merupakan poin penting dalam hal ini. Sejalan dengan Pasal 25 Permendes No 4 Tahun 2015 bahwa adanya kerja sama mampu memberikan sumbangsih, baik itu modal tambahan maupun pelanggan baru yang bermunculan akibat promosi yang digalakkan dalam kemampuan mengelola penjualan dan pemasaran. Kemampuan mengelola penjualan dan pemasaran akan

meningkatkan pelanggan. Semakin banyak pelanggan dan modal yang cukup, pengelola BUMDesa mampu memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Poin K3 (mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat) menghasilkan rerata sebesar 4,20 artinya pada posisi baik. Kerja sama yang baik sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan hal utama. Sejalan dengan teori agensi bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik baiknya. Kepercayaan ini mampu memberikan semangat dan dedikasi bagi pengelola dalam melakukan keputusan terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendirian BUMDesa yang tertuang pada Bab 2 Pasal 3 Permendes No 4 Tahun 2015.

Dengan demikian kekompakan kerja tim maupun kerja sama yang baik dalam pengelolaan BUMDesa merupakan salah satu faktor dalam mendorong kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sofyani, Atmaja, & Rezki, 2019) bahwa faktor-faktor yang mendorong kinerja BUMDesa diantaranya kekompakan kerja tim dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.

4.7.3. Pengaruh Prinsip Partisipatif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) partisipatif (X_2) = 2,568, signifikansi = 0,014 dan standar coefficients = 0,250 (25%). Karena nilai thitung > dari ttabel (2,568 > 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh $0,014 < 0,05$, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis ketiga (H_3) dengan H_a diterima. Artinya prinsip partisipatif (X_2) berpengaruh sebesar 25% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip partisipatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin.

Variabel prinsip partisipatif diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 2,33 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) jumlah skor jawaban prinsip partisipatif sebesar 3,6667 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana penerapan prinsip kooperatif dengan cuku baik. Rerata tingkat keterapan variabel kooperatif pada BUMDesa di Kabupaten Merangin sebesar 4,13 artinya pada kondisi yang cukup baik bahkan bisa dikatakan baik dengan kinerja keuangan sebesar 4,14 artinya pada kondisi yang baik. Hal ini berarti bahwa semakin baik menerapkan prinsip partisipatif pada tata kelola maka semakin baik pula kinerja keuangan.

Hasil ini sejalan dengan teori social enterprise bahwa seseorang atau kelompok sosial masyarakat sebagai agen perubahan yang mampu melaksanakan cita-cita dan memperbaiki nilai sosial dalam tatanan

kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendirian BUMDesa bahwa pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015. Sebagai agen perubahan maka seluruh komponen baik itu pengelola, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat maupun masyarakat sekitar dan lainnya memberikan kontribusinya berupa masukkan dalam rangka pemilihan jenis dan unit usaha BUMDesa melalui musyawarah desa.

Sebagai partisipasinya dalam pemilihan jenis dan unit usaha BUMDesa menentukan kearah mana pengembangan usaha. Usaha yang tepat dengan keuletan dan keseriusan para pengelola sebagai wujud agen perubahan berpengaruh pada perkembangan usaha. Semakin membesar dan berkembang usaha ini tentu memberikan hubungan positif pada kinerja keuangan yang mana perolehan laba semakin meningkat. Perolehan laba yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUMDesa di Kabupaten Merangin berada pada posisi yang baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiez (Sofyani, Atmaja, & Rezki, 2019) bahwa dengan keseriusan dan keuletan serta sikap pantang menyerang merupakan faktor-faktor yang mendorong kinerja Badan Usaha Milik Desa.

4.7.4. Pengaruh Prinsip Emansipatif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) emansipatif (X_3) = 0,307, signifikansi = 0,971 dan standar coefficients = 0,03 (3%). Karena nilai thitung < dari ttabel (0,307 < 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,971 > 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tidak signifikan, maka hipotesis keempat (H_4) dengan H_a ditolak. Artinya prinsip emansipatif (X_3) tidak berpengaruh karena hanya memiliki pengaruh sebesar 3% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada variabel emansipatif memiliki rata-rata keterapan sebesar 2,92 artinya pada kondisi yang kurang baik dengan kinerja keuangan sebesar 4,14 artinya pada kondisi yang baik. Karena hasil Standarized Coefficients Beta hanya sebesar 3% maka penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip emansipatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa prinsip emansipatif tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin.

Tindakan nepotisme dalam pengelolaan BUMDesa masih terus berjalan. Dimana pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan tidak mengedepankan profesionalisme dalam artian kompetensi sumber daya manusia ataupun track recordnya sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses kegiatan.

Akibat dari kepentingan beberapa pihak yang merasa apabila tidak satu visi misi maka akan menyulitkan proses pengelolaan BUMDesa yang sudah direncanakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (2017) bahwa rangkap jabatan perangkat desa dengan pelaksana teknis juga ditemukan di lapangan dan penelitian Jaitun (2013) menunjukkan bahwa tidak ada yang memberikan sanksi kepada perangkat pemerintahan desa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik berupa teguran lisan ataupun pemotongan gaji berkala karena masih kentalnya hubungan kekeluargaan diantara perangkat pemerintah desa.

Pemerintah desa beranggapan masyarakat akan tetap mendukung program desa dengan bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan. Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ikut berwenang dalam program ini merasa tidak sepemikiran. Sehingga timbulah asimetri informasi yang mana ketidaksamaan informasi yang terjadi, bahwa pengelola merasa memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek pengembangan usaha dibandingkan dengan BPD yang diatur dalam Permendes No 4 Tahun 2015 Pasal 31 Ayat 2 bahwa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa. Ketidaksamaan informasi ini menyebabkan kebingungan dimasyarakat atas penyebaran informasi yang tidak merata.

Perbedaan informasi akan berimbas pada pertumbuhan BUMDesa karena kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa yang tertuang pada Bab 3 Pasal 10 Permendes No 4 Tahun 2015 memiliki argumen masing masing dalam mengelola organisasi tersebut. Dengan ini tingkat pertumbuhan BUMDesa menjadi tidak optimal dan kinerja keuangan menjadi tidak stabil.

4.7.5. Pengaruh Prinsip Transparan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) transparan (X_4) = 2,507, signifikansi = 0,017 dan standar coefficients = 0,225 (22,5%). Karena nilai thitung > dari ttabel (2,507 > 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,017 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis kelima (H_5) dengan H_a diterima. Artinya prinsip transparan (X_4) berpengaruh sebesar 22,5% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Variabel prinsip transparan diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 2,33 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) skor jawaban prinsip transparan sebesar 3,7083. Rata-rata keterapannya sebesar 3,71 artinya responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan prinsip transparan dengan cukup baik. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip

transparan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin transparan menerapkan prinsip tata kelola maka semakin meningkatkan kinerja keuangan.

Transparansi pada pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Merangin merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan para pengelola BUMDesa dalam membuat kebijakan pengelolaan laporan dan data-data yang terbuka sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan pada setiap BUMDesa di Kabupaten Merangin.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati & Martanti, 2017) bahwa praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDesa dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengelolaan BUMDesa sudah bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan.

Transparan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai kinerja keuangan dengan diselenggarakan pengungkapan berupa pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana, mekanisme pemilihan pengurus BUMDesa dan jenis unit usaha, mekanisme pemilihan tenaga atau staf, mekanisme penilaian kinerja bagi pengelola, sistem remunerasi bagi pengelola, mekanisme pemberian reward dan punishment berbasis kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, mekanisme penyertaan modal BUMDesa dan kerjasama investasi pihak luar, mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.

Secara teoritis pengelola BUMDesa harus menerapkan dengan baik prinsip tata kelola dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu keterbukaan pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi. Sebab BUMDesa merupakan organisasi yang dibangun atas dasar musyawarah bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dengan penerapan prinsip transparan secara meluas dan menyeluruh pada BUMDesa di Kabupaten Merangin maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini sehingga tingkat pencapaian kinerja keuangan BUMDesa dapat lebih baik.

4.7.6. Pengaruh Akuntabel Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) akuntabel (X_5) = 2,710, signifikansi = 0,010 dan standar coefficients = 0,260 (26,0%). Karena nilai thitung > dari ttabel (2,710 > 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh $0,010 < 0,05$, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis keenam (H_6) dengan H_a diterima. Artinya prinsip akuntabel (X_5) berpengaruh sebesar 26,0% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Variabel prinsip akuntabel diketahui skor terendah dari jawaban responden adalah 3,14 dan skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata (mean) skor jawaban prinsip akuntabel sebesar 4,0610. Rata-rata keterapannya adalah 4,06 artinya responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabel dengan baik.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan prinsip akuntabel pada tata kelola BUMDesa Kabupaten Merangin, maka akan semakin baik kinerja keuangan.

Dalam Permendes No 4 Tahun 2015 Bagian Kedelapan menerangkan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa. Pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Prinsip Akuntabel pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Merangin merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik. Akuntabel berhubungan dengan kewajiban dari pengelola BUMDesa dan pihak terkait dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif. Akuntabel sebagai bentuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban ini meliputi verifikasi laporan keuangan BUMDesa oleh pengawas, pelaporan keuangan BUMDesa secara berkala, arah dan kebijakan strategis BUMDesa, rencana kerja tahunan, pelaporan dokumen-dokumen seperti AD/ART dan SOP serta dokumen rencana usaha.

Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelola kepada

pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam perundang-undangan guna memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Rindi, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, Putu Pania Awitiana (2017) bahwa BUMDesa Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

4.7.7. Pengaruh Prinsip Sustainable Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (thitung) sustainable (X6) = 1,106, signifikansi = 0,276 dan standar coefficients = 0,117 (11,7%). Karena nilai thitung < dari ttabel (1,106 < 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,276 > 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh (H7) dengan H_a ditolak. Artinya prinsip sustainable (X6) tidak berpengaruh karena memiliki pengaruh sebesar 11,7% terhadap kinerja keuangan (Y) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada variabel prinsip sustainable memiliki rata-rata keterapan sebesar 2,79 artinya pada kondisi yang kurang baik dengan kinerja keuangan sebesar 4,14 artinya pada kondisi yang baik. Karena hasil Standardized Coefficients Beta hanya sebesar 11,7% maka penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prinsip sustainable tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa prinsip sustainable tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin. Kelangsungan adalah bagaimana unit usaha dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Namun ketidakmampuan BUMDesa dalam mengembangkan dan melestarikan kegiatan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Setiap unit usaha memiliki konflik yang beragam dengan cara penyelesaian masing-masing. BUMDesa di Kabupaten Merangin masih belum mampu atau memiliki cara dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Permasalahan timbul dan berasal dari internal pengelola. Konflik internal membuat kondisi BUMDesa menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana pengelola tidak lagi bersemangat dalam menjalankan kegiatan dan merasa tidak memiliki tanggungjawab penuh atas tugasnya. Permasalahan internal yang begitu kompleks berimbas pada keberlangsungan BUMDesa.

Survei kebutuhan masyarakat merupakan strategi bisnis yang dapat dilakukan dalam hal pengembangan usaha. Dimana dapat dilihat kondisi yang sesungguhnya mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan. Dengan adanya survei ini mampu memberikan evaluasi pada kegiatan usaha yang sedang berlangsung sehingga ada pembaharuan atau inovasi pada usaha demi memenuhi hajat hidup orang banyak. Namun hal ini

membuat pengelola BUMDesa terlena, sebab mereka hanya berfokus pada kegiatan yang sedang berlangsung saja tanpa mengkaji survei kebutuhan masyarakat.

Tidak adanya program survei kebutuhan masyarakat berimbas pada kegiatan usaha yang lambat laun menjadi tertinggal. Unit-unit usaha baru bermunculan dengan sistem yang lebih modern dan mencukupi apa yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan BUMDesa mengalami kemunduran dan bahkan terhenti pelaksanaannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Widiastuti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, dan Rudy Suryanto (2019) bahwa Dari indikator aspek sustainable, indikator survei kebutuhan masyarakat secara berkala merupakan indikator yang keterterapannya masih rendah. BUMDes merasa cukup dengan usaha yang sudah berjalan dan belum menjadikan survei kebutuhan secara berkala sebagai instrumen untuk mengembangkan usaha dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh T. Handono Eko Prabowo (2014) bahwa warga masyarakat memiliki "*mindset*" program pengentasan kemiskinan pemerintah dianggap sebagai "*amal*" dan tidak memerlukan sebagai upaya serius untuk melaksanakan program.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Secara bersama-sama penerapan prinsip-prinsip tata kelola yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainable berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Dengan kata lain semakin baik penerapan tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka semakin baik pula kinerja keuangan.
2. Prinsip kooperatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik dalam menerapkan prinsip kooperatif maka semakin baik pula dalam meningkatkan kinerja keuangan.
3. Prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik menerapkan prinsip partisipatif pada tata kelola maka semakin baik pula kinerja keuangan.
4. Prinsip emansipatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa prinsip emansipatif tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin.
5. Prinsip transparan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di

Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin transparan menerapkan prinsip tata kelola maka semakin meningkatkan kinerja keuangan.

6. Prinsip akuntabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti semakin baik penerapan prinsip akuntabel pada tata kelola BUMDesa Kabupaten Merangin, maka akan semakin baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.
7. Prinsip sustainabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa prinsip sustainabel tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan penulis dan atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola BUMDesa yang belum diatur dalam Undang-Undang namun sebaiknya pengelola dan pihak terkait untuk terus menerapkan tata kelola pada pengelolaan BUMDesa demi kesuksesan proram pengentasan kemiskinan.
2. Diharapkan bagi pengelola dan pihak terkait untuk lebih memperhatikan tata kelola BUMDesa pada aspek emansipatif dan sustainabel karena masih belum berjalan dengan baik.
3. Perlunya peran aktif pemerintah dalam membina masyarakat untuk mengelola BUMDesa dan memberikan kesadaran arti penting program ini sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mengkaji lebih dalam mengapa prinsip emansipatif dan prinsip sustainabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan mengumpulkan bukti-bukti empiris dan teoritis.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja keuangan selain variabel prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui sejauh mana variabel-variabel independen tersebut menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya sampel BUMDesa pada desa berkembang. Selain melengkapi metode survei dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat memwawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan jawaban kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Brigham, & Houston. (2011). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi Kesebelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpren Kecamatan Kanor)*. 4(1), 116–125.
- Bumdes Gagal di Merangin. (2019). *Jambi Pos*. Retrieved from <https://jambipos.id/2019/05/14/bumdes-gagal-total-kades-air-lago-siau-dituding-lemah-pengawasan>
- Cooper, D. R., & Schindler, S. P. (2017). *Metode Riset Bisnis Volume 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Crowther, D., & Seifi, S. (2014). *Corporate Governance and International Business*. Retrieved from bookboo.com
- Hulgard, L. (2010). *Dircouses of Social Entrepreneurship Variation of The Same Theme. Emes The European Research Network*.
- Husnan, S. (2015). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). *BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)*. 2017, 27–28.
- Prabowo, T. H. E., & Economics, F. (2014). *Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia*. 30, 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Purnomo, J. (2016a). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Jakarta: Tim Infest.
- Purnomo, J. (2016b). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*. Jakarta: Tim Infest.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Usaha Kolektif Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sekaran, U. (2017). *Research Methods for Bussines Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Sihabudin. (2019). Pengaruh Kompetensi Manajerial, Kemitraan Usaha dan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan. (Survey Pada BUMDES di Jawa Barat Yang Terdaftar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Artikel Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung*.

Sofiyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Retrieved from <http://www.keuangandes.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa>

Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). *Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia : An Exploratory Study*. 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>

Widiastuti, H., Manuhara, W., & Rahman, E. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. 22(2), 257–288.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. 2017. Model Pengembangan Bumdes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian Masyarakat Di Provinsi Jambi.

Blog Bumdes. 2019. Diunduh:

<https://blog.bumdes.id/2019/05/tantangan-dalam-pengelolaan-bumdes-apa-saja/>.

Blog Bumdes. 2019. Diunduh:

<https://blog.bumdes.id/2019/04/pengendalian-internal-dengan-menilai-kinerja-keuangan-bumdes/>.

Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP). 2013. Data BUMDesa Tahun 2019.

Jambi Pos. 2019. Diunduh:

<https://jambipos.id/2019/05/14/bumdes-gagal-total-kades-air-lago-siau-dituding-lemah-pengawasan>.